



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**K E P U T U S A N  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 11 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROMPERDA) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

Menimbang : a. bahwa dengan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Program Pembentukan Perda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5568)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Nopember 2019 Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020.

KESATU : Dengan Keputusan ini disetujui Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 , sesuai kesepakatan bersama antara Badan Pembentukan Perda DPRD dengan Tim Eksekutif.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 20 Nopember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

  
**IMAM SHOLIKIN**

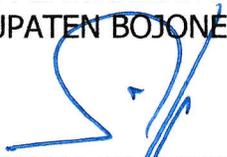
**Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Bojonegoro  
Nomor : /I Tahun 2019**

NO	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			KETERANGAN
		BARU	UBAH	CABUT	
1	2	3	4	5	6
1	Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas	√			Usulan DPRD
2	Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa	√			Usulan DPRD
3	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	√			Usulan DPRD
4	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	√			Usulan DPRD
5	Raperda tentang Hiburan	√			Usulan DPRD
6	Raperda tentang Pengembangan Kawasan Industri	√			Usulan DPRD
7	Penyelenggaraan Pendidikan	√			Diprakarsai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro
8	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro		√		Diprakarsai oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro karena adanya penggabungan OPD yang serumpun yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian serta Status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Griya Dharma Kusuma		√		Diprakarsai oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro karena mendasarkan pada Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu terkait dengan perubahan bentuk hukum BUMD yang sebelumnya Perseroan Terbatas (PT) untuk penambahan nomenklatur dibelakang Nama Perusahaan yaitu Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan yang sebelumnya Perusahaan Daerah untuk penambahan nomenklatur dibelakang Nama Perusahaan yaitu Perusahaan Umum Daerah
10	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Bangkit Bangun Sarana		√		
11	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro		√		

NO	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			KETERANGAN
		BARU	UBAH	CABUT	
1	2	3	4	5	6
					(Perumda)
12	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah		√		
13	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha		√		
14	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		√		
15	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2020-2040	√			Diprakarsai oleh PU Bina Marga dan Penataan Ruang sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 yaitu Pencabutan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan jika muatan rencana berubah lebih dari atau sama dengan 20% (Dua Puluh Persen)
16	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Pengelola Participating interest 10 %;	√			Diprakarsai Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro
17	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Gas.	√			Diprakarsai Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro
18	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang Pertanian	√			Diprakarsai oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro

NO	JUDUL RAPERDA	JENIS RAPERDA			KETERANGAN
		BARU	UBAH	CABUT	
1	2	3	4	5	6
19	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	√			Merupakan Raperda wajib yang selalu dilakukan pembentukan setiap tahun anggaran
20	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	√			
21	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	√			
22	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa		√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;</li> <li>- adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan Kepala Desa, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015; dan</li> <li>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.</li> </ul> </li> </ul>
23	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah		√		Diprakarsai oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bojonegoro

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO

  
**IMAM SHOLIKIN**